

LEARNING SOCIETY
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY
(Telaah Atas Konsep Civil Society And Learning Society)

Oleh:

Abdul Aziz
NIM. 00110260

FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2005

LEARNING SOCIETY
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY
(Telaah Atas Konsep Civil Society And Learning Society)

SKRIPSI

Diajukan Pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Islam, Universitas Islam
Negeri Malang,
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Islam (S. Pdl.)

Oleh:

Abdul Aziz
NIM. 00110260

FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

2005

LEARNING SOCIETY

SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY

(Telaah Atas Konsep Civil Society And Learning Society)

Oleh:

Abdul Aziz
NIM. 00110260

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing,

Drs. A. Fatah Yasin, M. Ag.
NIP. 150 287 892

Mengetahui:
Dekan Fakultas Tarbiyah,

Dr. H. M. Djunaidi Ghoni

NIP. 150 042 031

LEMBAR PENGESAHAN

LEARNING SOCIETY

**SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY
(Telaah Atas Konsep Civil Society And Learning Society)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Aziz

NIM. 00110260

Telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. PdI.)
Pada Tanggal, 15 April 2005

Dewan Penguji :

Tanda Tangan

1. **Dr. H. M. Djunaidi Ghoni**

Penguji Utama

NIP. 150 042 031

2. **Drs. H. Sudiyono**

Ketua/Sekretaris

NIP. 150 220 828

3. **Drs. A. Fatah Yasin, M. Ag.**

Penguji/Pembimbing

NIP. 150 287 892

Mengesahkan:

Rektor Universitas Islam Negeri Malang,

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo

NIP. 150 196 286

MOTTO:

**Masyarakat Belajar “learning society”, Fondasi
Lahirnya Masyarakat Madani “civil society”.**

(Indra Djati Sidi)

**Pendidikan Yang Mengobyektifikasi Peserta Didik
Sama Dengan Memperbodohnya, Sehingga Tidak
Terjadi Kesadaran. Maka, Pendidikan Yang
Membebaskan Menjadi Suatu Keniscayaan
Mewujudkan Masyarakat Madani, “civil society”.**

(Paulo Freire)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Penembang Cinta, yang tersusun dari senandung kepabitan

Penembang Cinta, yang terekam dalam imaji kecemasan

Penembang Cinta, yang mengalir dari dawai – dawai kepedihan

Penembang Cinta, yang mencuat dari adab hati penuh kegelisahan

Penembang Cinta, yang lahir dari rahim penderitaan, dan

Penembang Cinta, yang hadir ditengah – tengah kesepian hidupku, yaitu:

- ☞ Ibunda tercinta atas warisan semangat, ilmu, dan kasih sayangnya serta doa yang selalu mengiringi hidupku.*
- ☞ KH. RB. Ahmad Muhammad, atas segala jasa dan motivasinya.*
- ☞ Keluarga Besar Ma'had Tarate Pandian Sumenep, atas segala perjuangannya, hingga diri ini merasakan manis getirnya hidup yang mendidik dan berpendidikan serta penuh keadaban (civility).*
- ☞ Keluarga Besar Ma'had Nurul Hidayah Aengbaja Keneke Bluto Sumenep, yang senantiasa berjuang, “demi pendidikanku”.*
- ☞ Keluarga Besar Ma'had Daarut Tauhid, Aengbaja Raja Bluto Sumenep, atas warisan nilai – nilai civility (keadaban).*
- ☞ Keluarga Besar Ma'had Sunan Ampel Al – Aly UIN Malang, atas warisan pengalamannya dan tak bosan – bosannya memberikan motivasi.*

*☞ Pelita dan penyejuk hatiku, yang senantiasa mengajari aku Cinta dan cara
mengarunginya...*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan semesta alam, yang dengan hidayah, rahmat, dan taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, yang berjudul “*Learning Society* Sebagai Upaya Mewujudkan *Civil Society*” (*Telaah Atas Konsep Learning Society And Civil Society*).

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahcurahkan kepada manusia perombak dekadensi moral, “Muhammad Saw.”, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebidaban menuju ke alam yang penuh dengan peradaban (*civilized*), “Iman, Islam, dan Ihsan”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi ini, tentunya pelbagai pihak yang memberikan kontribusi, baik secara khusus terhadap Skripsi ini, maupun terhadap kehidupan penulis itu sendiri. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. *Abi* (alm.) *wa Ummi* tercinta, dan segenap keluarga, yang telah memberikan dorongan, bimbingan, asuhan dan didikan pada penulis. Karena kasih sayang—nyalah, penulis “mampu beraktualisasi diri” dalam mengarungi hidup yang lebih berarti dan bermakna.
2. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Dr. H. M. Djunaidi Ghoni, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

4. Drs. A. Fatah Yasin, M. Ag., yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Islam, yang telah mendidik penulis dalam menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
6. Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) yang telah mengapresiasi dan memberikan masukan konstruktif berkaitan dengan judul Skripsi yang penulis angkat.
7. Burhanuddin, MA. (Koordinator bidang Riset dan Diskusi *Indonesian Institute for Civil Society/INCIS*) Jakarta, yang telah memberikan hasil *Survey* tentang *Tantangan dan Hambatan Civil Society di DKI Jakarta*, September s/d Desember 2002.
8. Prof. Dr. Nyoman Sudana Degeng (Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang) yang telah memberikan semangat (*ghirah*) pada penulis untuk *intens* melakukan pengkajian terhadap cita-cita dan melakukan usaha-usaha pembentukan Masyarakat Belajar (*learning society*).
9. Prof. Drs. H. Mas Ahmad Icksan (Profesor Emeretus, dan Guru Besar Universitas Islam Malang) yang telah memberikan semangat (*ghirah*) pada penulis untuk *intens* melakukan pengkajian dan diskusi terhadap cita-cita dan melakukan usaha-usaha pembentukan Masyarakat Madani (*civil society*).
10. Dr. Djoko Saryono, M. Pd. (Konsultan Pendidikan Jawa Timur) yang telah memberikan pandangan sekilas tentang Masyarakat Madani (*civil society*).
11. Dewan Kyai dan Pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi, dalam penulisan Skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesi (PMII) Komisariat Sunan Ampel Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang telah mengawal penulis dalam menumbuhkembangkan paradigma kritis transformatif.

13. Segenap Fungsionaris *Laboratorium Masyarakat Madani* (LM3) Malang, yang telah mengantarkan penulis pada bagaimana menumbuhkembangkan tiga dimensi-kemampuan, “*Intellectual Quotient* (IQ), *Emotional Quotient* (EQ), dan *Spiritual Quotient* (SQ)”.
14. Segenap Fungsionaris *Lingkar Study Wacana* (LSW) Malang, yang telah menyemangati penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
15. *Jami’il Musyrifin wa al Murabbiyyin* Ma’had Sunan Ampel Al–Aly Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang selalu menyemangati penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
16. Dan semua pihak yang telah ikut membantu, khususnya Saudariku yang telah berkenan mengusahakan beberapa *Referensi* atau *Daftar Kepustakaan* dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa (TYMK) membalasnya dengan balasan yang setimpal, serta kehadiran karya ilmiah ini turut menyemarakkan proses terwujudnya Masyarakat Madani (*civil society*) yang berkeadaban (*civilized*).

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya, penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak.

Malang, 15 April 2005

Penulis,

Abdul Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Definisi dan Batasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II. CIVIL SOCIETY AND LEARNING SOCIETY

A. Civil Society: Makna, Historis, dan Terma di Indonesia	22
a.1. Civil Society: Sebuah Makna	22

a.2. Historis dan Perkembangan Civil Society Di Indonesia.....	28
a.3. Sekilas Wacana Civil Society Di Indonesia.....	35
B. Tinjauan Filosofis Tentang Learning Society	39
b.1. Learning Society: Sebuah Definisi.....	39
b.2. Learning Society: Upaya Memberdayakan Pendidikan Masyarakat.....	43
b.3. Learning Society: Sebuah Harapan.....	45

**BAB III. LEARNING SOCIETY SEBAGAI UPAYA UPAYA
MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY**

A. Wajah Pendidikan Kita: Sebuah Catatan Kritis Menuju Paradigma Baru	46
B. Upaya Mencipta dan Mewujudkan Learning Society	49
C. Cita–cita Perubahan dan Cita Ideal Civil Society	53

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran–saran.....	55

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Aziz, Abdul, Skripsi, 2005. *Learning Society Sebagai Upaya Mewujudkan Civil Society (Telaah Atas Konsep Civil Society And Learning Society)*. Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Islam–Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Drs. A. Fatah Yasin, M. Ag.
Key Word: *Civil Society And Learning Society*

Masyarakat Belajar (*Learning society*) merupakan wacana alternatif dalam dunia kependidikan, yang menitikberatkan pada bagaimana pendidikan dapat diperoleh, dari mana dan kapan saja, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Setiap aktivitas yang dilakukan selalu dipahami sebagai proses belajar. Karenanya sekolah itu ada di mana–mana, tidak hanya ada dalam sekolah (*Formal institution*). Sedangkan Masyarakat Madani (*Civil society*) merupakan wacana yang mengalami proses yang cukup panjang. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi dan demokratisasi, yang saat itu lebih dikenal dengan istilah *Civil Society*. *Civil Society* merupakan wilayah–wilayah sosial yang terorganisasi dan bercirikan; keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian, menjunjung tinggi nilai–nilai demokrasi dan keadaban (*Civility*). Untuk bisa mewujudkan Masyarakat Madani sebagaimana ciri tersebut di atas, nampaknya masyarakat dituntut untuk selalu belajar dan belajar secara kontinyu, sehingga lahir kesadaran yang tinggi untuk membangun pola kehidupan yang dinamis–konstruktif.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep *Civil Society And Learning Society*, penulis berkeinginan meneliti pelbagai buku yang membicarakan kedua hal tersebut. Adapun yang menjadi fokus masalahnya adalah: [1] Bagaimana konsep *Civil Society*? [2] Bagaimana konsep *Learning Society*? [3] Bagaimana konsep *Learning Society* dalam upaya mewujudkan *Civil Society*?. Sedangkan untuk menemukan jawaban terhadap fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian literatur, “*Library research*” (kajian pustaka), maksudnya adalah bahwa konsep *Civil Society And Learning Society* banyak sekali diperbincangkan oleh para ahli dan tokoh yang ditulis dalam pelbagai buku, jurnal, majalah, koran dan lain–lain. Oleh karena itu, tulisan para tokoh dan ahli tersebut penulis jadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah analisis isi (*Content analysis*), yakni pemahaman secara konseptual yang berkelanjutan di dalam deskripsi, artinya melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran para tokoh tentang Masyarakat Madani dan Masyarakat Belajar.

Dari kajian pustaka ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Masyarakat Belajar sangat berpeluang untuk mewujudkan Masyarakat Madani. Karena dalam Masyarakat Belajar terdapat kesadaran yang tinggi akan pentingnya belajar–tanpa harus digerakkan–oleh intitusi dalam bentuk apapun dan meniscayakan peran keluarga dan lingkungan. Masyarakat Madani merupakan masyarakat berperadaban, masyarakat yang hidupnya didasarkan pada ruh Islam, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai–nilai demokrasi, masyarakat yang cinta keadilan, masyarakat yang menghargai persamaan hak dan *egalitarianisme*. Sedangkan untuk mewujudkan Masyarakat Madani, harus diawali dengan terciptanya Masyarakat Belajar. Dengan lahir dan terciptanya Masyarakat Belajar, sesungguhnya dengan sendirinya Masyarakat Madani akan tercipta. Karena pada hakikatnya, ruh Masyarakat Madani adalah Masyarakat Belajar []

**LEARNING SOCIETY SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY**

(Telaah Atas Konsep Civil Society And Learning Society)

SKRIPSI

Oleh:

**Abdul Aziz
NIM. 00110260**



**FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2005**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, istilah *Civil society* telah lama menjadi perbincangan di antara para ilmuwan atau pun para pakar. Beragam istilah yang mereka gunakan dalam memperbincangkannya. Ada yang menggunakan istilah *Civil society*, masyarakat sipil, ada pula yang memakai istilah Masyarakat Madani. Perbincangan istilah tersebut tidak lain mengarah pada bagaimana melakukan usaha–usaha penguatan masyarakat, “masyarakat yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), memahami nilai–nilai *pluralisme*, dan berkeadaban (*civility*)”.

Pemikiran seputar *Civil society*, yang di Indonesia telah diterjemahkan menjadi “*masyarakat sipil*” atau “masyarakat madani”, sebenarnya merupakan imbas dari perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia Barat, khususnya di Negara–negara industri maju tepatnya Eropa Barat dan Amerika Serikat (Dawam, 1999:133). *Civil society* itu sendiri adalah terjemahan dari bahasa latin, *Civilis societas*. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang dapat mengaktualisasikan Islam dalam kebersamaan atau perwujudan tauhid sosial penuh keterbukaan, meminjam istilahnya Damardjati Supadjar (Widodo dkk, 2000:34). Kata “madani” itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya *civil* atau *civilized* (beradab). Istilah Masyarakat Madani adalah terjemahan dari *Civil society* (Qodri, 2004:126)

Akan tetapi, walaupun di Indonesia istilah Masyarakat Madani telah memasyarakat, dan maknanya “sejalan” dengan semangat Al-Qur’an, sampai saat ini belum ada respon yang “positif” dari masyarakat itu sendiri. Jangankan mewujudkannya, yang berusaha memasyarakatkan istilah tersebut masih dalam hitungan jari, “individu”. Kira-kira apa sebenarnya yang melatarbelakangi Masyarakat Madani belum bisa tercipta? Disisi lain, keberadaan Masyarakat Madani menurut Franz Magnis Suseno (Widodo dkk, 2000:55) sejatinya didekati secara faktual dan bukannya dengan pendekatan normatif.

Namun, yang terpenting bukanlah setuju atau tidak dengan Masyarakat Madani melainkan adakah Masyarakat Madani di Indonesia, sejauh mana, dan implikasinya apa? Secara normatif dapat ditanyakan: bagaimana Masyarakat Madani diperkuat apalagi diwujudkan? Kearah mana sebaiknya masyarakat dibawa, demikian halnya perihal Masyarakat Madani, kemana sebaiknya diarahkan? Maka, “Masyarakat Madani” tentu bukan “gagasan yang diimpor” maupun gagasan yang tidak diimpor”, karena ia sama sekali bukan sebuah gagasan, melainkan sebuah kenyataan yang ada atau tidak ada, atau untuk sebagian ada tetapi tidak peduli apakah kita menggagasnya atau tidak. Pada hakekatnya Masyarakat Madani (mengikuti paham Hegel, 1770-1851 M) adalah kehidupan masyarakat di luar lingkungan keluarga, primordial atau lingkungan kenalan pribadi yang diminati secara pribadi, disatu pihak dan di lain pihak (barangkali diatur, tetapi) tidak ditentukan, diadakan oleh negara.

Jadi, Masyarakat Madani hidup dan berkembang karena dinamikanya sendiri, bukan karena dorongan, apalagi inisiatif–inisiatif dari Negara. Input–input dari negara (yang tentu terus–menerus ada) ditampung dengan respon yang mandiri (hubungan negara-masyarakat madani bukan generatif), melainkan menurut *ideal type*–nya dialogal dialektis. Tesis ini senada dengan apa yang ditegaskan oleh Luqman Hakim dalam Widodo Usman dkk., (Ed) 2000:132, bahwa masyarakat sipil (*civil society*), bermula dari pergumulan masyarakat Barat untuk mengurangi peranan negara (*state*) terhadap kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Hikam (1996:3), Masyarakat Madani dapat dideskripsikan sebagai wilayah–wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain; kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai–nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah rung politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, dan tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, serta tidak terserap dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya ruang publik yang bebas, dimana tempat komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat, juga dipahami sebagai suatu proses bukan sebagai sesuatu yang jadi. Lalu, adakah karakteristik masyarakat madani itu, sehingga bisa “terdeteksi” “eksistensinya”, dan apa maksud adanya karakteristik itu sendiri?

Adanya karakteristik Masyarakat Madani, tidak lain dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam upaya merealisasikan atau mewujudkan wacana Masyarakat Madani diperlukan prasyarat–prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan Masyarakat Madani. Prasyarat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi Masyarakat Madani. Karakteristik tersebut antara lain adalah adanya *Free Public Sphere*, Demokratis, Toleransi, Pluralisme, Keadilan Sosial (*social justice*) dan berkeadaban (Rozak, dkk. (Ed) 2003:247).

Upaya mewujudkan *civil society*, tentunya beragam cara dapat dilakukan, diantaranya dengan mengagendakan politik dan ekonomi dalam format reformasi oleh Riswanda Imawan, keadilan dan kesetaraan *gender* oleh Mary Astuti, wudlu koseptual dan eksistensial oleh Damardjati Supadjar (Widodo, dkk (Ed):34, 103, 219) dan lain sebagainya. Namun, dari sekian usaha dan upaya yang mencoba diterapkan–pada hakekatnya tidak terlepas dari kondisi dan peran pendidikan yang ada, di Indonesia. Oleh karenanya penulis memandang konsep Masyarakat Belajar (*learning society*) cukup strategis dan berpeluang dalam upaya mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*).

Kenapa harus Masyarakat Belajar (*learning society*)? Karena pendidikan adalah tonggak kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat mengamalkan sesuatu dengan mudah dan benar. Pendidikan juga dapat memanusiakan manusia,

sehingga mampu mengelola bumi beserta isinya (*khalifah fi al-Ardh*). Serta dengan pendidikanlah manusia bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akan tetapi, karena pendidikan pula, bangsa ini bisa “terjajah” oleh kebodohan, kemiskinan, demoralisasi dan lain sebagainya. Anehnya, dalam konteks kekinian dan ke-Indonesiaan, tampaknya pendidikan belum dianggap sebagai salah satu faktor pokok penyebab terpuruknya bangsa ini, walaupun hal ini termasuk keprihatinan bersama, meminjam istilah Indra Djati Sidi (2001:3). Tudingan–tudingan sebagian besar pengamat bahkan para politisi yang mengatakan bahwa ekonomi dan politiklah yang menentukan baik buruknya suatu bangsa, merupakan salah satu contohnya. Bangsa ini lupa, bahwa sesuatu harus dimulai dengan pendidikan. Tidak ada bangsa di dunia yang maju tanpa melaksanakan pendidikan yang baik. Pendidikan dinegeri ini selalu dijadikan alat politik dan alat mencari popularitas (Lihat Djauzak Ahmad, *Kompas*, 17/01/2005).

Masalah pendidikan, kelihatannya tidak habis–habisnya menjadi wacana publik. Karena besaran masalah dan implikasinya terhadap kelangsungan eksistensi bangsa, pendidikan terlalu besar untuk diselesaikan oleh salah satu komponen sistem masyarakat kita, apakah itu pemerintah yang dalam hal ini ‘bertindak’ sebagai pembuat kebijakan (*public policy*), lembaga pendidikan (sekolah), para pakar pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau komponen lainnya? Semisal keluarga. (Syafnir, dkk. 2003: v). Bahkan, Syafnir Ronisef salah satu editor buku “*Mengurai Benang Kusut Pendidikan*” (2003: viii), mengatakan bahwa pendidikan

merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas bangsa. Oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dan kemajuan pendidikan adalah suatu determinasi (kebulatan, rangkaian yang tak terputuskan, Lihat *Kamus Populer*, 1994:106).

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya—melalui pelbagai ilmu pengetahuan—yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, dimana proses pengajaran itu menjadi tanggungjawab orang tua (yang melahirkan dan yang mendidik—pendidik—, guru dan masyarakat) menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia yang sempurna (Ibnu Rusn, 1998:68).

Pendapat Al-Ghazali di atas, secara kontekstual semakna dengan apa yang ditegaskan oleh Indra Djati Sidi (2001:4) yang mengatakan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya menjadi persoalan “individu”—sekolah semata—, melainkan menjadi masalah masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman akan dunia pendidikan yang tefokus pada pendidikan formal saja sejatinya tidaklah tepat, sebab konsep pendidikan (mendidik) yang ada seyogyanya diartikan secara luas. Hal ini dipahami untuk menyebut semua upaya guna mengembangkan tiga hal, yaitu: pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Sedangkan cara untuk mencapai ketiganya adalah ketika tiga jenis pendidikan dapat berjalan seperti yang diharapkan, pendidikan formal, informal dan non formal.

Lebih jauh cendikiawan Muslim, Noercholith Madjid, mengatakan bahwa membincang pendidikan, tentu melibatkan banyak hal yang harus direnungkan.

Sebab, pendidikan meliputi keseluruhan tingkah laku manusia yang dilakukan demi memperoleh kesinambungan, pertahanan dan peningkatan hidup. Dalam bahasa agama, demi memperoleh *ridla* atau perkenan Allah. Sehingga keseluruhan tingkah laku tersebut membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (*berakhlak al karimah*), atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian (Indra, 2001: xi).

Pandangan Noercholish Madjid di atas, tampaknya sesuai dengan pemikiran Naquib Al-Attas dalam tulisannya tentang “Islamisasi Ilmu” (*Pemikiran Islam Kontemporer*, 2003:344) yang mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan manusia yang “baik”. Dengan kata lain, pendidikan adalah sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk rasional, sehingga mereka mampu merumuskan makna-makna yang melibatkan penilaian, pembedaan, dan penjelasan. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak dapat dikekang atau dibelenggu oleh manusia yang lainnya, dalam artian manusia bebas melakukan segala aktivitas yang dikehendakinya dengan tidak menghilangkan esensi serta nilai-nilai kemanusiaannya. Peserta didik seyogyanya tidak hanya menjadi obyek, tapi juga menjadi subyek yang akan menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam lingkungan pendidikan dan dapat mencapai tujuan pendidikan secara komprehensif (Freire: 2001:60).

Dalam hal pendidikan, kita tidak mungkin hanya bertumpu pada sekolah atau yang lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah–dengan tetap

'berwajah' lama—, apalagi sekolah “diminta untuk bertanggung jawab” atas tercipta dan lahirnya peserta didik yang dapat mengintegrasikan tiga dimensi—kemampuan—, *Intellectual Quotient* (IQ), *Emotional Quotient* (EQ), dan *Spiritual Quotient* (SQ). Karena, masalah pendidikan tidak hanya menjadi masalah “individu”—sekolah—, melainkan menjadi masalah kita bersama. Dengan demikian “sekolah” tidak hanya diartikan secara formal-institusional, melainkan ada dimana-mana, terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga aspek dalam kehidupan tersebut menjadi sarana dan media pembelajaran. Suasana seperti inilah sebenarnya yang diharapkan dapat melahirkan iklim kondusif bagi lahir dan berkembangnya, yang menurut Indra Djati Sidi, disebut *learning society* (masyarakat belajar).

Adapun pembicaraan tentang konsep bagaimana seharusnya sebuah sekolah dan pendidikan, bertujuan pada bagaimana kehidupan manusia bisa di tata, sesuai dengan nilai—nilai kewajaran dan keadaban (*civility*). Semua orang pasti mempunyai harapan dan cita—cita bagaimana sebuah kehidupan menuju kepada yang lebih baik. Karena itu, pendidikan pada gilirannya berperan mempersiapkan setiap orang untuk selalu berperilaku penuh keadaban (*civility*). Keadaan inilah yang secara praktis sangat dibutuhkan dalam setiap gerak dan perilaku.

Pada sisi lain, kita sering menyaksikan adanya beberapa kasus yang berkorelasi dengan penindasan rakyat yang dilakukan oleh penguasa—merupakan realitas yang sering kita lihat, amati dan kita dengar dalam setiap pemberitaan pers, baik melalui media elektronika maupun media cetak. Misalnya kasus penindasan yang terjadi di

Indonesia tatkala Orde Baru masih berkuasa, yakni penindasan terhadap keberadaan hak tanah rakyat yang diambil oleh penguasa dengan alasan pembangunan. Atau juga pengekangan dan pembungkaman pers dengan adanya pemberedelan beberapa media massa oleh penguasa, serta pembantaian para ulama (*kyai*) dengan dalih dukun santet sekitar tahun 1999 yang dilakukan oleh kelompok oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau ini yang sering terjadi, masihkah ada harapan terciptanya masyarakat madani di negeri ini?

Melihat bagian kecil dari sekian banyak realitas kehidupan di negeri Indonesia seperti tersebut di atas, apa yang kita pikirkan ketika mendengar atau melihat fenomena pembantaian massal, penculikan para aktivis demokrasi di pelbagai negara, termasuk Indonesia, serta apa yang kita pikirkan tatkala menyaksikan pembatasan ruang publik (*public sphere*) untuk mengemukakan pendapat di muka umum?

Pertanyaan–pertanyaan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada perlunya dikaji kembali kekuatan rakyat atau masyarakat (*civil*) dalam konteks *inteksi–relationship*, baik antara rakyat dengan negara, maupun antara rakyat dengan rakyat. Kedua pola hubungan interaktif tersebut akan memposisikan rakyat sebagai bagian integral dalam komunitas negara yang memiliki kekuatan *bargaining* dan menjadi komunitas masyarakat sipil yang memiliki kecerdasan, analisa kritis yang tajam serta mampu berinteraksi di lingkungannya secara demokratis dan berkeadaban (Rosyada, dkk. 2003:237–238).

Bentuk–bentuk nyata dari sikap dan perilaku penuh keadaban itu, yakni lebih mementingkan yang strategis jangka panjang dari pada yang sesaat dan sementara, berorientasi pada *problem solving* dan peningkatan taraf hidup, serta mementingkan moral dan etika. Pendidikan pada akhirnya akan berperan menciptakan masyarakat berkeadaban (*civilize culture society*). Yaitu suatu masyarakat yang anggota–anggotanya mengetahui dan bisa terus menjalankan aturan dan mekanisme yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Secara kontras–yang membedakannya dari kultur masyarakat primitif (*primitif culture society*)–budaya masyarakat berkeadaban cenderung memandang bahwa pemuasan kebutuhan dan hasrat (nafsu) itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk mempertahankan hidup. Budaya masyarakat berkeadaban akan mengorbankan kesenangan sementara demi meraih hidup kedepan yang lebih maju. Karena itu, kelompok masyarakat yang sudah *civilize* akan sangat menghormati aturan bersama yang sudah disepakati. Disinilah pendidikan punya peranan yang sangat penting. Sebab pada dasarnya pendidikanlah yang membuat seseorang “*being educated*”. Sehingga pendidikan akan dianggap bisa berperan mengikis habis semua indikasi–indikasi *primitive culture*. Dengan demikian akan terwujudlah apa yang disebut Masyarakat Madani (*civil society*).

Sedangkan kemungkinan akan adanya kekuatan *civil* sebagai bagian dari komunitas bangsa ini akan mengantarkan pada sebuah wacana yang saat ini sedang berkembang, yakni Masyarakat Madani. Wacana Masyarakat Madani ini, merupakan wacana yang telah mengalami proses yang sangat panjang. Ia muncul bersamaan

dengan proses modernisasi dan demokratisasi, terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat Barat modern, yang pada saat itu di kenal dengan istilah *civil society*. Di tengah lemahnya peran negara (*state*) dalam menciptakan harapan masyarakat yang berbasis demokratisasi, maka penguatan *civil society* merupakan agenda yang sangat penting (*urgen*).

Kenapa *civil society* perlu di perkuat? Secara teoritis, menurut Larry Diamond seperti dikutip Hasan Syadzily (Azra, 2003: iv) mengatakan bahwa *civil society* dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi. *Pertama*, *civil society* menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara. Asosiasi independen dan media yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara melalui kontrol publik. *Kedua*, beragam dan pluralnya dalam masyarakat sipil dengan pelbagai kepentingannya, bila diorganisir dan terkelola dengan baik, maka hal ini dapat menjadi dasar yang penting bagi persaingan yang demokratis. *Ketiga*, *civil society* juga akan memperkaya peranan partai-partai politik dalam hal partisipasi politik, meningkatkan efektivitas politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan (*citizenship*). *Keempat*, ikut menjaga stabilitas negara. Dalam arti bahwa *civil society*, karena kemandiriannya terhadap negara, mampu menjaga independensinya yang berarti secara diam-diam mengurangi peran negara. *Kelima*, sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru. *Keenam*, menghalangi dominasi rezim otoriter.

Keprihatianan bangsa yang tengah dilanda krisis multidimensi dalam pelbagai aspek kehidupan—membuat peran pendidikan, khususnya di Sekolah–sekolah, dipertanyakan. Bahkan pendidikan secara tidak langsung diminta untuk ‘bertanggung jawab’. Pendidikan pada dasarnya sangat berperan terhadap tewujudnya Masyarakat Madani (*civil society*), masyarakat yang gandrung akan adanya keadilan, egalitarianisme (persamaan) dan demokrasi. Prinsip Masyarakat Belajar (*learning society*) adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam bidang pendidikan. Sedangkan *Civil Society* diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani yang mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban, dan perkotaan. Disini agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya (Widodo, dkk. (Ed) 2002:30). Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*), maka konsep Masyarakat Belajar (*learning society*) menjadi suatu hal yang niscaya dan bisa jadi merupakan ‘satu-satunya’ cara strategis dalam upaya mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*). Karena untuk mencipta Masyarakat Madani, dasarnya adalah pendidikan yang berbasis *learning society* (masyarakat belajar).

Maka, untuk memastikan tesis di atas dan melihat secara *rigid* serta menemukan ‘ruh’ Masyarakat Belajar (*learning society*) sebagai titik kejelasan—dalam upaya mencipta dan mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*)—, penulis mencover Skripsi ini ke dalam sebuah judul yaitu: **“Learning Society Sebagai Upaya Mewujudkan Civil Society: Telaah Atas Konsep Civil Society And Learning Society” []**

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang “kosong”, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Masalah dalam penelitian dinamakan fokus (Moleong, 2000:7). Dengan demikian, berpijak pada paparan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Civil Society*?
2. Bagaimana konsep *Learning Society*?
3. Bagaimana konsep *Learning Society* dalam upaya mewujudkan *Civil Society*?

C. Tujuan Penelitian

Dari keempat poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep *Civil Society*
2. Untuk mengetahui konsep *Learning Society*
3. Untuk mengetahui konsep *Learning Society* dalam upaya mewujudkan *Civil Society*

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai pengantar wacana berpikir tentang konsep pendidikan masa depan yang bernuansa Masyarakat Belajar (*learning society*) demi menciptakan Masyarakat Madani (*civil society*).

2. Bagi Khalayak Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi kependidikan, yakni bagaimana menatap nasib dunia pendidikan demi masa depan bangsa, yang nantinya dapat dianalisa oleh masyarakat pada umumnya, kaum terpelajar pada khususnya—guna memahami konsep Masyarakat Belajar (*learning society*) dalam mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*).

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu melahirkan nuansa baru bagi proses pengembangan ilmu pendidikan, sekaligus menjadi sumbangan pemikiran dalam menciptakan Masyarakat Belajar (*learning society*) demi mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*).

E. Definisi dan Batasan Istilah

Agar penelitian ini mengarah sekaligus menghindari terjadinya penafsiran (*interpretasi*) lain terhadap istilah–istilah yang ada, maka penting (*urgen*) kiranya adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta batasan–batasannya. Hal ini

bertujuan agar ada kesamaan penafsiran serta menghindari kekaburan apalagi melahirkan makna ganda (*ambigu*) pada pokok bahasan dalam Skripsi ini.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Civil Society

Civil society berasal dari bahasa Inggris. Jika ditelusuri arti kata perkata, *civil* bermakna beradab, tahu adat sipil (Nadjib dan Williem, 2000:53). Secara *semantic*, menurut Iwan Gardono Sujatmiko, dalam buku *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (2003:43), *civil* (madani meminjam istilahnya Cak Noer) juga diartikan sebagai “Adab” dan “Kota” serta sebagai Madinah atau historis. Sedangkan kata *society* secara *etimologi* (bahasa) bermakna masyarakat atau perhimpunan (Nadjib dan Williem, 2000:187). Namun, dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan *civil society* adalah suatu konsep yang mereformasi total terhadap masyarakat yang hanya mengenal supremasi kekuasaan pribadi seorang raja, yang tercermin dalam empat prinsip; persamaan (*equality*), kebebasan, hak-hak asasi manusia (HAM), serta prinsip musyawarah. Selain itu, juga masyarakat yang berkeadilan, mampu mengakui pluralitas agama, sosial dan budaya diantara warga negaranya. Istilah Madani juga diartikan sebagai suatu generasi yang cenderung memiliki adab, kesopanan atau masyarakat “tamaddun”, (Sufyanto, 2001:8) berkeadaban atau *civility society*. (Lihat

Azyumardi Azra, dalam Burhanuddin (Ed), *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, 2003:57).

2. Learning Society

Learning society juga berasal dari bahasa Inggris yang merupakan istilah kalau tidak sebuah slogan, dimana proses lahirnya yakni pasca *civil society*. Bila ditinjau dari arti kata perkata, *learning society* terdiri dari dua kata, *learning and society*. Istilah *learning* dalam kamus lengkap praktis, 2000:121, didefinisikan sebagai proses belajar. Sedangkan menurut Dee Dickinson, Presiden *New Horizons for Learning*, mengartikan bahwa *Learning* adalah belajar sebagai suatu proses (lihat pujian untuk *Quantum Learning*, 2002:v). Jadi, *learning* adalah proses belajar, dimana semangat (*ghirah*) bisa tumbuh tanpa ada sesuatu yang menggerakkan, sekolah misalnya. Sedangkan kata *society*, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Jadi, *learning society* dapat diartikan sebagai masyarakat yang secara terus menerus atau kontinu melakukan aktivitas belajar. Tetapi, dalam hal ini yang dimaksud dengan *learning society* adalah konsep pendidikan yang disamping menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat atau lingkungan. Tepatnya, yang dimaksud *learning society* dalam pembahasan Skripsi ini adalah masyarakat yang selalu belajar dan belajar, sehingga timbulah kesadaran yang tinggi akan pentingnya belajar tanpa harus digerakkan oleh

institusi atau lembaga manapun (tanpa ada tugas dari pendidik, aktivitas belajar tetap berlangsung secara terus menerus, misalnya). Karena masalah pendidikan tidak hanya menjadi masalah “individu”–sekolah formal–, melainkan menjadi masalah masyarakat secara keseluruhan.

Dua istilah di atas, yakni *civil society and learning society*, merupakan dua istilah yang terdapat dalam judul Skripsi yang berjudul *Learning Society Sebagai Upaya Mewujudkan Civil Society: Telaah Atas Konsep Civil Society And Learning Society* ini, dapat dipahami bahwa secara operasional sebagai konsep dalam proses belajar–Masyarakat Belajar (*learning society*)– yang berparadigma mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*).

F. Metode Penelitian

1. Obyek dan Lingkup Studi

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penulisan karya ilmiah ini difokuskan pada obyek kajian tentang “*Learning Society Sebagai Upaya Mewujudkan Civil Society: Telaah Atas Wacana Learning Society and Civil Society*”, yang merupakan sebuah analisa tentang konsep Masyarakat Belajar dalam upaya menciptakan Masyarakat Madani.

2. Jenis Penelitian

Dengan membatasi obyek studi dan permasalahannya, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan penulisan berdasarkan

literature, *library research* yang sifatnya *eksploratif*. Sesuai dengan sifatnya maka *library research* adalah penjelajahan masalah untuk mendapatkan uraian pokok tentang problema yang akan dibahas (Sufyanto, 2001:22). Dengan demikian penulisan karya ilmiah ini dilakukan berdasarkan hasil studi terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan, baik yang mengkaji secara khusus pemikiran tentang bagaimana membangun iklim yang kondusif bagi lahirnya Masyarakat Belajar (*learning society*) maupun konsep bagaimana mencipta dan mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*), serta beberapa tulisan yang ada relevansinya dengan wacana Masyarakat Belajar maupun Masyarakat Madani. Disamping itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan diskriptif-kualitatif, yang menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau suatu realita yang ada.

3. Data Yang Diperlukan

Data yang digunakan dalam kajian pustaka ini berifat kualitatif tekstual dan kontekstual dengan menggunakan dasar terhadap pernyataan (*statemen*) dan proporsi–proporsi ilmiah yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan, baik yang tercantum dalam bentuk buku, majalah, jurnal, koran, dan lain–lain, tentunya yang berkaitan dengan wacana Masyarakat Belajar (*learning society*) atau Masyarakat Madani (*civil society*).

4. Sumber Data

Setiap penelitian, sumber data termasuk komponen utama. Tanpa sumber data suatu penelitian tidak akan berjalan. Karena tulisan ini bukan studi pemikiran seseorang dengan karyanya, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, sumber data yang dimaksud adalah berasal dari semua tulisan hasil pemikiran para pakar baik yang ada dalam buku–buku, jurnal, majalah, koran dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang dipakai, maka teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian *library reseach* adalah teknik dokumenter (sebagaimana penjelasan di atas), yaitu dikumpulkan dari buku–buku, jurnal, majalah, makalah, atau artikel, koran dan lain–lain termasuk karya dari para pakar pendidikan, pemerhati, atau pengamat pendidikan, yang karya dimaksud masih cukup relevan dan ada kaitannya dengan kajian tentang Masyarakat Belajar (*learning society*) dan Masyarakat Madani (*civil society*).

6. Analisa Data

Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Yang dimaksud analisis isi (*content analysis*) adalah pemahaman secara konsepsional yang berkelanjutan di dalam deskripsi (Katsoff, 1992:1), artinya melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan

pemikiran para tokoh tentang Masyarakat Madani (*civil society*) dan Masyarakat Belajar (*learning society*). Sedangkan menurut Soejono dan Abdurrahman mengutip dari Hadari Nawawi (1983: 75) menjelaskan bahwa analisis isi dalam suatu penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku—yang menggambarkan situasi penulis—, dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis. Disamping itu dengan cara ini dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku—buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau kelompok.

Dengan teknik ini, maka data yang kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data sejenis dan menganalisisnya secara kritis guna mendapatkan suatu formulasi analisa, serta dalam mengolah data tersebut peneliti lebih menfokuskan pada isi buku atau pemikiran yang ada kaitannya dengan wacana Masyarakat Belajar (*learning society*) dan Masyarakat Madani (*civil society*), baik dari para pakar atau pemerhati pendidikan, yang selanjutnya dipaparkan secara sistematis. Sebagaimana yang disinyalir oleh Noeng Muhadjir (1989: 60), tentang syarat analisis isi (*content analysis*) yaitu: obyektif, sistematis dan general []

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam laporan penelitian ini, penulis menformat dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. Menjabarkan tentang Pendahuluan, yang didalamnya memuat: Latar belakang masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II. Memaparkan tentang konsep Masyarakat Madani (*civil society*) dan Masyarakat Belajar (*learning society*), yang meliputi: *Civil Society*: Sebuah definisi, Historis, dan perkembangan *Civil Society*, Wacana *Civil Society* di Indonesia, Tinjauan filosofis tentang *Learning Society*, *Learning Society*: Upaya memberdayakan pendidikan masyarakat, *Learning Society*: Sebuah definisi, dan *Learning Society*: Sebuah harapan.

BAB III. Memaparkan tentang analisis atas konsep *Learning Society* (masyarakat belajar) sebagai upaya mewujudkan *Civil Society* (masyarakat madani) yang meliputi: Wajah pendidikan kita: Sebuah catatan kritis menuju paradigma baru, Upaya mencipta dan mewujudkan *Learning Society*, Cita-cita perubahan dan cita ideal mewujudkan *Civil Society* (masyarakat madani).

BAB IV. Merupakan bab Penutup, dimana pada pembahasan ini hanya terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

CIVIL SOCIETY DAN LEARNING SOCIETY

A. CIVIL SOCIETY: MAKNA, HISTORIS, DAN TERMA DI INDONESIA

A.1. Civil Society: Sebuah Definisi

Dalam mendefinisikan terma Masyarakat Madani (*civil society*) sangat bergantung pada kondisi sosio–kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep Masyarakat Madani (*civil society*) merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat.

Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa definisi Masyarakat Madani (*civil society*) dari pelbagai pakar di pelbagai negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena Masyarakat Madani ini (Rozak dkk., (Ed) 2003:238-242).

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau, dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Madani (*civil society*) adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul diantara hubungan–hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan–hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Oleh karenanya, maka yang dimaksud

Masyarakat Madani (*civil society*) adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara.

Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan negara dalam Masyarakat Madani (*civil society*) ini diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni *individualisme*, pasar (*market*) dan *pluralisme*. Batasan yang dikemukakan oleh Rau di atas juga menekankan pada adanya ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus ada dalam Masyarakat Madani (*civil society*), *individualisme*, pasar (*market*) dan *pluralisme*. Konsep yang ditawarkan Rau ini, secara teks menggambarkan adanya pengaruh eksternal untuk terciptanya Masyarakat Madani (*civil society*), ia mengakui historis sebagai bagian dalam *menkonstruksi* Masyarakat Madani (*civil society*) itu sendiri. Namun secara kontekstual, ia termasuk tokoh yang *liberal* atau bahkan sebaliknya, “ektrem” dalam memandang eksistensi Masyarakat Madani (*civil society*), dengan ciri-ciri yang ditawarkannya, “*individualistik*, pasar (*market*), dan menjunjung tinggi nilai-nilai *pluralisme*”.

Kedua, digambarkan oleh Han Sung-joo, dengan latar belakang kasus Korea Selatan. Ia mendefinisikan bahwa Masyarakat Madani (*civil society*) merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan *independen*, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya

yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam *Civil Society* ini.

Konsep yang dikemukakan oleh Han ini, menekankan pada adanya ruang publik (*public sphere*) serta mengandung 4 (empat) ciri dan prasyarat bagi terbentuknya Masyarakat Madani (*civil society*), yakni *pertama*, diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara. *Kedua*, adanya ruang *publik* yang memberikan kebebasan bagi siapa pun dalam mengartikulasikan isu-isu politik. *Ketiga*, terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang mendasar pada nilai-nilai budaya tertentu. *Keempat*, terdapat kelompok inti di antara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi dan sosial ekonomi.

Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh Kim Sunhyuk, juga dalam konteks Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Madani (*civil society*) adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari (*re*) produksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang *publik*, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip *pluralisme* dan pengelolaan yang mandiri.

Definisi ini menekankan pada adanya organisasi kemasyarakatan yang relatif memosisikan secara otonom dari pengaruh dan kekuasaan negara. Eksistensi

organisasi—organisasi ini mensyaratkan adanya ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan untuk memperjuangkan kepentingan—kepentingan tertentu.

Beragam batasan dalam memahami terma Masyarakat Madani (*civil society*) di atas, tentunya, tidak terlepas dari sosio kultural masyarakat yang mengitarinya. Hal ini merupakan suatu analisa dari kajian kontekstual terhadap *performa* yang diinginkan dalam upaya mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*). Itu semua dapat dipelajari dari perbedaan penekanan (*aksentuasi*) dalam memasyarakatkan idealisme Masyarakat Madani (*civil society*). Akan tetapi secara global dari ketiga batasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Madani (*civil society*) adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara, yang memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat, terdapatnya lembaga—lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Di Indonesia, terma Masyarakat Madani (*civil society*) mengalami penerjemahan yang berbeda—beda dengan sudut pandang yang berbeda pula, seperti Masyarakat Madani sendiri, Masyarakat Sipil, Masyarakat Kewargaan, Masyarakat Warga dan *Civil Society* (tanpa diterjemahkan).

Masyarakat Madani, merupakan penerjemahan istilah dari konsep *civil society* yang pertama kali digulirkan oleh Dalto Seri Anwar Ibrahim, dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festifal Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak

menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju.

Lebih jelas Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Madani (*civil society*) adalah sistem sosial yang subur yang diazaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan undang-undang, bukan nafsu atau keinginan individu yang menjadikan keterdugaaan atau *predictability* serta ketulusan (*transpancy system*).

Paradigma dengan pemilihan terma Masyarakat Madani (*civil society*) ini dilatar belakangi oleh konsep *Kota Ilahi*, *Kota Peradaban* atau *Masyarakat Kota*. Di sisi lain, pemaknaan Masyarakat Madani (*civil society*) ini juga dilandasi oleh konsep tentang *al-Mujtama' al-Madani* yang diperkenalkan oleh Naquib Al-Attas (Dawam, 1999:60) seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia dan salah seorang pendiri *Institut for Islamic Thought and Civilization* (ISTAC), yang secara definitif, memaknai Masyarakat Madani (*civil society*) merupakan konsep masyarakat kota dan masyarakat yang beradab.

Terjemahan makna Masyarakat Madani ini (*civil society*), banyak dikutip oleh para cendekiawan dan ilmuan di Indonesia, seperti Noercholith Madjid, M. Dawan Rahardjo, Azyumardi Azra, dan lain sebagainya. Dan pada prinsipnya konsep Masyarakat Madani (*civil society*) adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang

mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban serta menghargai akan adanya kemajemukan (*pluralisme*).

Sedangkan *Masyarakat Sipil*, merupakan penurunan langsung dari terma *Civil Society*. Istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansor Faqih untuk menyebutkan prasarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar lebih baru dan lebih baik.

Berbeda dengan *Masyarakat Kewargaan*, konsep ini pernah digulirkan dalam sebuah seminar nasional asosiasi ilmu politik indonesia XII di Kupang NTT. Wacana ini juga digulirkan oleh M. Ryas Rasyid dengan tulisannya “*Perkembangan Pemikiran Masyarakat Kewargaan*”, Riswanda Imawan dengan karyanya “*Rekrutmen Kepemimpinan dalam Masyarakat Kewargaan dalam Politik Malaysia*”. Dan konsep ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara (*state*).

Adapun *Civil Society*, terma ini (dengan tidak menerjemahkannya) merupakan konsep yang digulirkan oleh Muhammad AS. Hikam. Menurutnya konsep *Civil Society* yang merupakan warisan wacana yang berasal dari Eropa Barat, akan lebih mendekati substansinya jika tetap disebutkan dengan istilah aslinya. Menurutnya pengertian *Civil Society* (dengan memegang konsep de Tocquville) adalah wilayah–wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi

berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma–norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Dan sebagai ruang *publik*, *Civil Society* merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan–jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Berbagai pengistilahan tentang wacana Masyarakat Madani di Indonesia tersebut, secara substansial bermuara pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara (*policy of state*) yang cenderung memosisikan warga negara sebagai subyek yang lemah. Untuk itu, maka diperlukan penguatan masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kekuatan *bergaining* masyarakat yang cerdas di hadapan negara, terdapat ruang publik dalam mengemukakan pendapat, menguatnya posisi kelas menengah dalam komunitas masyarakat, adanya *independensi pers* sebagai bagian dari *social control*, membudayakan kerangka hidup yang demokratis, toleran serta memiliki peradaban dan keadaban (*civility*) yang tinggi.

A.2. Historis dan Perkembangan Masyarakat Madani

Untuk memahami Masyarakat Madani (*civil society*), terlebih dahulu harus dibangun paradigma bahwa konsep Masyarakat Madani ini bukan merupakan suatu

konsep yang final dan sudah jadi, melainkan ia merupakan sebuah wacana yang harus dipahami sebagai sebuah proses. Maka dari itu, untuk memahaminya haruslah dianalisis secara historik.

Seperti telah dipaparkan di atas, bahwa wacana Masyarakat Madani merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat (Rozak dkk., (Ed) 2003:242-246) yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana Masyarakat Madani dapat dirunut mulai dari Cicero sampai pada Antonio Gramsci dan de'Tocquville. Bahkan menurut Manfred Ridel, Kohen dan Arato serta M. Dawam Rahardjo, wacana Masyarakat Madani sudah mengemuka pada masa Aristoteles. Pada masa ini (Aristoteles, 384-322 SM.) Masyarakat Madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinonia politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah *koinonia politike* yang dikemukakan oleh Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap *etos*, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (*virtue*) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.

Konsepsi Aristoteles di atas diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah *societies civiles*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lain. Terma yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara kota (*city-state*), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsepsi Masyarakat Madani yang *aksentuasi*-nya, penekanan pada sistem kenegaraan ini dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (1588–1679 M) dan Jhon Locke (1632–1704). Menurut Hobbes, Masyarakat Madani harus menguasai kekuasaan mutlak, agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola–pola interaksi (prilaku politik) setiap warga negara. Sementara menurut Jhon Locke, kehadiran Masyarakat Madani dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Konsekuensinya adalah, Masyarakat Madani tidak boleh absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

Pada tahun 1767, wacana Masyarakat Madani ini dikembangkan oleh Adam Ferguson, dengan mengambil konteks sosio–kultural dan politik Skotlandia. Ferguson menekankan Masyarakat Madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Dengan konsepnya ini, Ferguson

berharap bahwa publik memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali despotisme, karena dalam Masyarakat Madani itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antar warga negara secara ilmiah.

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana Masyarakat Madani yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah Masyarakat Madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesis dari negara. Dengan demikian, maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Maka dari itu, Masyarakat Madani menurut Paine ini adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Paine mengidealkan terciptanya suatu ruang gerak yang menjadi domain masyarakat, dimana intervensi negara di dalamnya merupakan aktivitas yang tidak sah dan tidak dibenarkan. Oleh karenanya, maka Masyarakat Madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol negara demi kebutuhannya.

Perkembangan Masyarakat Madani (*civil society*) selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F. Hegel (1770–1831 M), Karl Marx (1818–1883 M) dan Antonio Gramsci (1891–1937 M). Wacana Masyarakat Madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh

ini menekankan pada Masyarakat Madani sebagai elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan sebuah reaksi dari model pemahaman yang dilakukan oleh Paine (yang menganggap Masyarakat Madani sebagai bagian yang terpisah dari negara). Menurut Hegel, Masyarakat Madani merupakan kelompok subordinatif dari suatu negara. Pemahaman ini menurut Ryaas Rasyid, erat kaitannya dengan fenomena masyarakat borjuis Eropa (*bürgerliche gesellschaft*) yang pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan dari dominasi negara.

Lebih lanjut Hegel, mengatakan bahwa struktur sosial terbagi atas 3 (tiga) entitas, yakni keluarga, Masyarakat Madani, dan negara. Keluarga merupakan ruang sosial pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat Madani merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan ekonomi. Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap Masyarakat Madani. Oleh karenanya, maka intervensi negara terhadap wilayah masyarakat bukanlah tindakan *illegitimate*, karena negara sekali lagi merupakan pemilik ide universal dan hanya pada tataran negara politik bisa berlangsung murni serta utuh. Selain itu, Masyarakat Madani pada kenyataannya tidak mampu mengatasi kelemahannya sendiri serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya bila tanpa keteraturan politik dan ketertundukan pada institusi yang lebih tinggi, yakni negara. Karenanya, negara dan Masyarakat Madani merupakan 2 (dua) entitas yang saling memperkuat satu sama lain.

Sedangkan Karl Marx, memahami Masyarakat Madani sebagai “masyarakat borjuis” dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaanya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sementara Antonio Gramsci, tidak memahami Masyarakat Madani sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan Masyarakat Madani pada basis material, maka Gramsci meletakkannya pada superstruktur, berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagai *political society*. Masyarakat Madani merupakan tempat perebutan posisi hegemonik di luar kekuatan negara. Di dalamnya aparat hegemoni mengembangkan hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat.

Pemahaman Gramsci memberikan tekanan pada kekuatan cendekiawan yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan dan politik. Dengan demikian Gramsci melihat adanya sifat kemandirian dan politis pada Masyarakat Madani, sekalipun pada instansi terakhir ia juga amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi).

Periode berikutnya, wacana Masyarakat Madani dikembangkan oleh Alexis de'Tocquville (1805-1859 M) yang berdasarkan pada pengalaman demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori Masyarakat Madani sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Bagi de'Tocquville, kekuatan politik dan Masyarakat Madani—lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian, dan kapasitas politik di dalam Masyarakat

Madani, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Tidak seperti yang dikembangkan oleh Hegelian, paradigma de'Tocquville ini lebih menekankan pada Masyarakat Madani sebagai sesuatu yang tidak apriori subordinatif terhadap negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) untuk menahan kecenderungan intervensionis negara. Tidak hanya itu, ia bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat yang sama mampu melahirkan kritis reflektif (*reflective-force*) untuk mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern. Masyarakat Madani tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan *publik* (masyarakat).

Dari pelbagai model pengembangan Masyarakat Madani di atas, model Gramsci dan de'Tocquville—lah yang menjadi inspirasi gerakan pro demokrasi di Eropa Timur dan Tengah pada sekitar akhir dasawarsa 80—an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justru dominasi negara atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti bahwa gerakan membangun Masyarakat Madani menjadi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga negara. Gagasan Masyarakat Madani kemudian menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkeraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian masyarakat (*public*).

Pertanyaannya, dari sekian konsep *civil society* yang beragam itu, kira-kira konsep siapa yang mendekati—paling relevan diterapkan di Indonesia? Menurut penulis, konsep yang paling tepat untuk konteks ke-Indonesia-an dan kekinian, adalah konsepnya Tocqueville. Hanya saja kita harus melihatnya dari konteks Indonesia, tidak mengandaikannya seperti Amerika, juga Eropa Timur. Gagasan *civil society* a la Tocqueville sangat efektif untuk mengurangi dominasi negara, menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*). Dilihat dari definisi—makna yang diberikan oleh Tocqueville, “memang lebih” mendekati relevansinya terhadap situasi dan kondisi Indonesia.

A3. Sekilas Wacana Civil Society di Indonesia

Gagasan Masyarakat Madani (*civil society*) yang mencul beberapa tahun terakhir ini di Indonesia berkaitan erat dengan gagasan dan visi demokratisasi yang tengah diperjuangkan oleh pelbagai kalangan. Asumsi di belakang gagasan itu adalah persepsi tentang perkembangan politik sejak Orde Baru, bahwa institusi “negara” telah tumbuh menjadi demikian kuatnya. Barangkali kesan itu timbul ketika melihat peranan pemerintah Orde Baru—tampil sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam pembangunan (Rahardjo, 1999:232).

Kebutuhan akan munculnya Masyarakat Madani sebagai bagian dari demokratisasi seolah-olah tidak bisa ditawar lagi, sebagaimana proses globalisasi berlangsung. Gagasan tentang Masyarakat Madani sesungguhnya merupakan

pemikiran politik lama, namun kini gagasan itu muncul kembali sebagai upaya penguatan masyarakat yang berbasis keadaban (*civility*).

Berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya Masyarakat Madani di Indonesia, diawali dengan terjadinya kasus–kasus yang luar biasa “memanipulasi” peran serta masyarakat, membatasi gerak dan kebebasan berpendapat, pers dibungkam, tanah-tanah rakyat dirampas, dan lain sebagainya. Melihat itu semua, maka secara esensial, Indonesia memang membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai–nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itulah diperlukan Masyarakat Madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasil yang optimal.

Selanjutnya, bagaimana menerapkan Masyarakat Madani di Indonesia? Adakah strategi yang jitu untuk menerapkannya? Menurut Dawam Rahardjo, dalam buku *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (2003:257-258) mengatakan ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan Masyarakat Madani di Indonesia. *Pertama*, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. *Kedua*, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sitem politik demokratis. Strategi ini berpandangan bahwa

untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. *Ketiga*, strategi yang membangun Masyarakat Madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua.

Apa yang diklasifikasikan oleh Dawam di atas, cukup jelas untuk kita amati, walaupun strategi pertama dan kedua, secara khusus kurang “bersinggungan” atau bahkan terlalu “meluas-umum” untuk kita masyarakatkan. Akan tetapi, memahami strategi ketiga, bagaimana terciptanya Masyarakat Madani, terlebih dahulu harus tercipta yang namanya demokratisasi. Dengan kata lain, terciptanya Masyarakat Madani sangat dipengaruhi oleh sejauhmana demokratisasi bisa tumbuh dan berkembang, memasyarakat–terimplementasi. Inilah sebenarnya bagian dari “ruh” bagaimana Masyarakat Madani (*civil society*) bisa tercipta.

Mendiskusikan Masyarakat Madani (*civil society*) di Indonesia, ternyata lebih mengarah pada aspek “horizontal”, dekat dengan aspek budaya. Masyarakat Madani (*civil society*) disini erat dengan “*civility*” atau keberadaban. Hal ini telah dihembuskan oleh pemikir masyarakat madinah yang mencoba melihat relevansi konsep tersebut dan menekankan toleransi antar umat beragama, Noercholish Madjid. Ia mencoba melihat Masyarakat Madani (*civil society*) berkaitan dengan masyarakat Madinah pada zaman rasulullah. Menurut Madjid, Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar *pluralisme* dan *toleransi*. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi walaupun sebenarnya Piagam Madinah

lebih bersifat “traktat” (uraian, risalah; perjanjian antar bangsa) horizontal dan bersifat agak asimetrik (tidak sama antara kedua belah sisi), dimana kelompok yang kuat (Muslim) dapat menentukan syarat perjanjian.

Penggunaan konsep Madani versi Cak Neor ini, dikritik oleh Muhammad A.S. Hikam, sebagai pemikir utamanya. Substansi yang diperdebatkan adalah “masyarakat ideal” dalam *Civil Society* itu sendiri. (Iwan, dalam Azra, dkk., 2003:42). Menurut Hikam, contoh kota Madinah kurang menceminkan relevansi dengan Indonesia. Tapi, *Civil Society* menekankan bentuk ideal masyarakat yang relevan dengan Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender merupakan salah satu substansinya (Lihat KIUK, *Jawa Pos*, 05/12/2004). *Walhasil*, Cak Nur, dalam melihat “masyarakat ideal” lebih menekankan visi yang partikularistik (pengutamaan kepentingan “pribadi”, Islam), sedangkan Hikam, sepaham dengan Gusdur, yang menganggap “Islam di Indonesia itu bersifat komplementer” (bersifat menyempurnakan, melengkapi; saling mengisi, Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, dalam Pius dan aL-Barry, 1994:354). Dan masih banyak lagi perbedaan penggunaan istilah bahkan mungkin makna, baik *Civil Society* dan atau Masyarakat Madani.

Dalam membicarakan Masyarakat Madani (*civil society*) di Indonesia tidak terlepas dari-konsep mana yang dipakai dan bagaimana melakukan kontekstualisasi, sehingga konsep tersebut dapat diterapkan secara proporsional dan masuk akal.

Sedangkan wacana Masyarakat Madani (*civil society*) selama hampir sepuluh tahun terakhir di tanah air, sekilas menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, dalam artian, banyaknya forum–forum diskusi dan perdebatan publik tentang wacana *Civil society* adalah salah satu buktinya. Walaupun *Civil Society* sangat penting, yang jelas ia bukan merupakan satu–satunya prasyarat proses menuju terciptanya masyarakat yang demokratis dan sejahtera (Hikam, 2000:112).

B. TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG LEARNING SOCIETY

b.1. Learning Society: Sebuah Definisi

Learning Society atau masyarakat belajar biasa juga disebut dengan *educational society* (pendidikan masyarakat). *Learning Society* secara praktek telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia—meski belum secara maksimal—namun secara konsep sudah meraba–raba. Sehingga, istilah *learning society* belum populer apalagi memasyarakat layaknya *Civil Society*. Pembahasan tentang *Learning Society* sejak tahun 1971 mulai diperkenalkan oleh Torsten Husen (Torsten, 1995:1). *Learning Society* merupakan pemberdayaan peran masyarakat dan keluarga dalam bidang pendidikan. Di Indonesia, selama ini peran lembaga pendidikan formal, “sekolah” yang mendapatkan perhatian serius. Sementara pendidikan non formal bahkan informal kurang—bahkan tidak mendapatkan perhatian. Berkaitan dengan masalah ini, Torsten Husen menekankan adanya suatu kenyataan bahwa sekolah itu adalah dan haruslah

merupakan bagian integral dari masyarakat disekitarnya, dan sama sekali tidak boleh bergerak di dalam kehampaan kehidupan sosial (Torsten,1995:5).

Apa yang dijelaskan Torsten di atas, selaras dengan apa yang ditegaskan oleh Indra Djati Sidi (2001:4), bahwa masalah pendidikan tidak hanya menjadi masalah individual lembaga pendidikan formal semisal sekolah, melainkan menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian sekolah tidak hanya diartikan secara formal institusional, melainkan juga berada dimana–mana, terutama dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Sehingga semua aspek dalam kehidupan tersebut menjadi sarana dan media pembelajaran. Suasana seperti inilah yang mendukung iklim kondusif bagi lahir dan terciptanya masyarakat belajar (*learning society*).

Jadi, pemahaman terhadap dunia pendidikan formal saja tidaklah tepat. Sebab konsep pendidikan (mendidik) haruslah diartikan secara luas dan integral. Hal ini demi tercapainya tiga pilar pendidikan, yaitu: pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang.

Dengan kata lain, untuk menyebutkan peristiwa yang dampaknya ialah berkembangnya pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Apabila suatu pendidikan sedari awal dibangun–dirancang seperti ini, “mengembangkan tiga hal tersebut”, maka hal ini disebut sebagai pendidikan formal dan non formal. Sebaliknya, apabila suatu tindakan tidak dirancang untuk mengembangkan ketiga al tersebut, dan berdampak demikian, maka

peristiwa tersebut dapat disebut sebagai pendidikan informal. *Albasil*, pendidikan formal dan non formal selalu berupa usaha atau upaya, sedangkan pendidikan informal berupa peristiwa dan peristiwa.

Pemahaman terhadap ketiga jenis pendidikan tersebut, semata-mata untuk memberikan *interpretasi* baru terhadap pendidikan itu sendiri, baik pendidikan formal, non-formal dan informal. Dengan *interpretasi* baru ini, diharapkan kegiatan pendidikan tidak hanya terfokus di lingkungan sekolah semata, tapi juga ada dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Pada akhirnya pendidikan non formal dan informal sama-sama mendapatkan perhatian yang serius, yang akan melengkapi pendidikan formal itu sendiri.

Dampak yang akan dinuai dari model *interpretasi* ini akan –“luar biasa”– manakala didukung oleh pelbagai pihak, baik itu pembuat kebijakan (*public policy*), pelaksana kebijakan, dan *stakeholders* pendidikan, “*turut serta menetapkan apa yang akan diajarkan, bagaimana cara terbaik mengajarkan dan menilai sesuatu yang telah diajarkan*”. Namun, apabila model pendidikan hanya berkuat pada *status quo*, pemerintah pusat–yang mengambil alih fungsi pendidikan, seperti yang terjadi pada saat sekarang ini–tidak memberdayakan bahkan *stakeholders* menjadi “tidak berarti dan tak berdaya”, misalnya dalam pelaksanaan ujian nasional (UN), maka ruh pendidikan itu akan hilang dengan sendirinya, dan yang akan terjadi adalah dunia pendidikan yang “abu-abu” dan tidak “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tujuan akhir

pendidikan itu sendiri. Pemerintah selalu terjebak pada istilah “gengsi”, kalau tidak ada perubahan kurikulum tiap tahun.

Pengaruh dari pengalaman–pengalaman pendidikan non formal dan informal juga akan membentuk masyarakat yang terdidik, “*masyarakat yang mampu menformat terjadinya transfer ilmu dan terinternalisasi nilai–nilai, yang pada akhirnya mampu melahirkembangkan generasi yang cerdas dan bermoral*”.

Lebih detail–operasional–*learning society* tercermin dalam arti sebagai berikut: [1] terbangunnya kelompok belajar yang berpotensi untuk *sharing* (berbagi) gagasan dan pengalaman, [2] terciptanya kerjasama dalam *problem solving*, dan adanya rasa tanggung jawab kelompok, [3] terbangunnya iklim saling memberi dan menerima antara yang satu dengan yang lainnya (Nurhadi dan Agus, 2003:47–48). Masyarakat belajar akan tercipta manakala terjadi komunikasi yang baik antara pendidik dengan peserta didik. Informasi bisa datang dari guru juga bisa datang dari siswa. Dalam masyarakat belajar, sang pendidik dengan peserta didik saling belajar, tidak ada sungkanisme, segan atau bahkan malu untuk saling bertanya, tidak ada pihak yang menganggap paling tahu, semua pihak mau saling mendengarkan. Setiap pihak saling percaya bahwa setiap orang, sama–sama memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari, dikaji, dan di*sharing*kan.

Bila setiap orang mau belajar dari orang lain, maka setiap orang lain bisa menjadi sumber belajar, yang berarti setiap orang akan kaya dengan pengetahuan dan pengalaman. Tidak ada yang mendominasi, tapi sama–sama punya rasa saling percaya

bahwa belajar kelompok dan belajar dengan pasangan, merupakan sumber pengetahuan. Apabila hal ini tercipta maka, suasana atau proses belajar mengajar menjadi lebih hidup dan bermakna.

b.2. Learning Society: Upaya Memberdayakan Pendidikan Masyarakat

Indonesia sedang dilanda krisis multidimensi yang berkepanjangan dalam pelbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya krisis ini, melahirkan keprihatinan yang cukup mendalam, yang salah satunya membuat peran pendidikan, khususnya di sekolah–sekolah dipertanyakan. Dengan melihat kondisi riil yang ada, seperti maraknya tawuran antar pelajar, merebaknya Narkoba, dan beberapa perilaku menyimpang lainnya, baik dari norma–norma agama dan budaya, seperti pergaulan bebas–sehingga peran pendidikan semakin dipersoalkan. Seolah pendidikan di sekolahlah yang harus bertanggung jawab terhadap pelbagai permasalahan yang menyelimuti generasi penerus bangsa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Tidak jarang pendidikan dijadikan kambing hitam terhadap ketidakberhasilan–untuk tidak dikatakan pendidikan telah mengalami kegagalan–dalam membentuk generasi yang bermoral. Bahkan, menurut Komaruddin Hidayat, terjadinya budaya korupsi di negeri ini, salah satu penyebabnya adalah gagalnya dunia pendidikan dalam pembentukan karakter agar hidup selalu dipandu nurani (*Kompas*, 03/02/2005).

Mungkin menjadi hal yang “wajar”, apabila permasalahan yang amat berat sebagaimana tersebut di atas harus dipikul atau bahkan ditanggung oleh pendidikan, utamanya di sekolah. Sebab, persepsi masyarakat terhadap sekolah mewakili kondisi yang ada dalam masyarakat atau negara. Tesis di atas, dikuatkan dengan historis suatu zaman, masa Plato dan Aristoteles, sebagaimana diungkapkan bahwa “sebagaimana negara, seperti itulah sekolah atau apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan dalam sekolah” (Azra, 1999:61). Apabila tesis yang kedua ini yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, maka apabila kondisi masyarakat, negara dinyatakan tidak berhasil atau gagal dalam mengantarkan masyarakat mencapai tujuan yang diinginkan, maka sesungguhnya diakibatkan oleh pendidikan yang jelek, tidak bermutu.

Sebaliknya, apabila kondisi masyarakat yang ada dinilai baik, maka pendidikan dapat dinyatakan berhasil mencapai tujuan yang dicanangkan. Pertanyaannya, apakah bisa di nilai demikian? Sebab dalam prakteknya banyak aspek dan pihak yang terlibat dalam mengantarkan bangsa Indonesia untuk sampai pada tujuan pendidikan, “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Wacana ini memberikan makna, bahwa diantara institusi yang mengambil peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan tidak hanya didominasi—menjadi tanggung jawab sekolah—, namun juga peran keluarga dan masyarakat menjadi hal yang niscaya.

Berangkat dari sini, menjadi penting diperhatikan; lingkungan diluar sekolah, baik secara formal, non formal, maupun informal. Bila hal ini terkontrol sedemikian

rupa, maka pada gilirannya akan tercipta lingkungan–iklim kondusif–, yang mampu mengembangkan potensi masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Terjadinya “imparsialisasi” terhadap “penanggung jawab” pendidikan suatu bangsa selama ini, adalah akibat dari lemahnya sistem pendidikan, dengan pemaknaan, telah terjadi apa yang biasa disebut dikotomi pendidikan. Hal ini juga “didukung” adanya “pencitraan–image” dalam masyarakat tentang, “siapa penanggung jawab” pendidikan itu sendiri.

b.3. Learning Society: Sebuah Harapan

Setelah kita tahu dan membahas bagaimana upaya membangun dan memberdayakan pendidikan masyarakat, serta memahami apa makna *learning society*, maka menjadi penting (*urgen*) memahami pula apa dan bagaimana sebenarnya harapan–harapan yang ingin dicapai dari konsep *learning society* kaitannya dengan *civil society*. Untuk apa? Agar apa yang kita kaji tidak terkesan *utopia* (suatu mimpi akan suatu negeri yang tak mungkin tercapai) atau bahkan *utopis* (kita termasuk orang yang mempunyai cita–cita besar yang tak mungkin menjadi kenyataan).

Adapun harapa–harapan yang hendak dicapai dari *learning society* (masyarakat belajar) dalam mewujudkan *Civil Society* (masyarakat madani) antara lain sebagai berikut: *pertama*, terciptanya masyarakat yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa (TYME). Tatanan masyarakat agamis yang bersifat dinamis karena memiliki perspektif moral. *Kedua*, terciptanya masyarakat yang demokratis dan

beradab, yang mau dan mampu menghargai adanya perbedaan pendapat. *Ketiga*, masyarakat yang mengakui adanya Hak–Hak Asasi manusia, menjunjung tinggi nilai–nilai HAM itu sendiri. *Keempat*, masyarakat yang tertib dan sadar hukum, budaya malu untuk melanggar hukum, melekat dalam semua sendi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan.

Kelima, masyarakat yang percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, masyarakat memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu dan teknologi. Kemajuan ini akan ditandai dengan tatanan kehidupan yang dinamis, kompetitif, inovatif, memiliki dinamika batiniyah yang kuat untuk meraih kemajuan–kemajuan demi kepentingan bangsa, berwawasan luas, berorientasi jauh ke depan dan tidak hanya pemakai teknologi atau sasaran pemasaran bahan–bahan jadi dari luar negeri, melainkan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang maju dalam peradaban ilmu dan teknologi di masa mendatang. *Keenam*, terwujudnya tatanan masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai–nilai luhur yang telah mengakar dalam tatanan masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam: *ukhwwah Islamiyah*, silaturrahmi, persamaan, adil, baik sangka, rendah hati, tepat janji, lapang dada, dapat dipercaya, harga diri dan sebagainya. *Kedelapan*, mewujudkan Masyarakat Belajar yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat Belajar ini menempatkan pendidikan sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus menerus sepanjang hayat (Tim Nasional *Reformasi Menuju Masyarakat Madani*, 1999:119-122).

Penyelenggaraan atau kegiatan pendidikan tidak lagi—harus terikat oleh ruang, waktu dan kelembagaan. Proses pendidikan dapat berlangsung dimana dan kapan saja. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat merupakan satu alternatif menuju terciptanya Masyarakat Belajar (*learning society*) yang pada akhirnya terwujudlah Masyarakat Madani (*civil society*).

Apabila delapan poin di atas dapat tercipta, maka cita-cita besar bangsa Indonesia, terwujudnya Masyarakat Madani, menjadi sebuah keniscayaan. Akan tetapi, mensukseskan delapan poin di maksud tidaklah semudah membalikkan telapak tangan yang kemudian butuh waktu yang relatif cepat. Tentunya, diperlukan usaha-usaha ekstra yang selanjutnya dicarikan batu loncatannya untuk diwujudkan. Tidak cukup “dipasrahkan” kepada satu pihak, lembaga untuk merealisasikan cita-cita tersebut, tapi, keterlibatan pelbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, LSM atau NGO serta organisasi pemuda lainnya menjadi hal yang niscaya untuk menyemarakkannya.[]

BAB III
LEARNING SOCIETY
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY

A. Wajah Pendidikan Kita: Sebuah Catatan Kritis Menuju Paradigma Baru

Selama ini, model pendidikan kita dan proses belajar yang diterapkan selalu berjalan tidak seimbang (*not balance*), antara kemauan pembuat kebijakan (*publik policy*), pelaksana kebijakan, dan *stakeholders*, antara pendidik dengan anak didik “berjalan sendiri-sendiri”. Pemerintah (Mendiknas) dengan rasa percaya diri yang cukup tinggi, melakukan “bongkar pasang” kebijakan (*policy*) ‘hanya’ demi menghindari anggapan “tambal sulam” kebijakan pendidikan, yang hal itu diasumsikan sebagai pikiran-pikiran “inovatif”, perubahan kurikulum dari tahun ke tahun misalnya, yang mempunyai dampak tidak “baik” dalam kacamata *publik*.

Pemerintah “tidak mau” melibatkan “*publik terdidik*” dalam pembahasan bagaimana sebaiknya sistem pendidikan itu dirancang dan diterapkan di negara ini. Bahkan mungkin, penyebab utama ketertinggalan kita dari negara lain dalam pelbagai kehidupan, entah ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya adalah disebabkan oleh menkulturnya “sentralisasi” pengelolaan negara yang berlebihan (*Kompas*, 14/02/2005). Akhirnya, sampai saat ini, kebijakan pendidikan (*public policy*) misalnya, masih terkesan “demi menghabiskan proyek”, bila sudah seperti ini, bagaimana nasib pendidikan kita ke depan? Tentunya, nasib pendidikan tidak hanya menjadi tanggung

jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab kita semua. Satu yang menjadi keniscayaan, kita mesti selalu kritis melihat setiap kebijakan yang kerap kali tidak memihak terhadap masyarakat dan sering memihak pada “masyarakat elit kapitalis” disana. Disisi lain, pelaksana kebijakan, para guru mayoritas bertindak sebagai subyek, siswa diposisikan sebagai obyek. Misalnya metode dan suasana pengajaran di sekolah–sekolah, peserta didik hanya disiapkan sebagai seorang anak yang harus mau mendengarkan (*mustami’an*), mau menerima seluruh informasi dan mentaati segala perlakuan gurunya. Bahkan yang lebih parah, tatkala yang dipelajari di sekolah ternyata tidak integratif dengan kehidupan atau realitas sehari–hari, yang mereka saksikan bertolak belakang dengan pelajaran di sekolah.

Budaya dan mental semacam ini pada gilirannya membuat siswa tidak mampu mengaktifasi kemampuan otaknya. Sehingga mereka tidak memiliki keberanian menyampaikan pendapat, lemah dalam penalaran dan lain sebagainya. Demi membangun paradigma dan visi pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman, maka kita harus menempuh dua gagasan, *pertama*, kita hendaknya mengubah paradigma *teaching* (mengajar) menjadi *learning* (belajar). Dengan perubahan ini proses pendidikan menjadi “proses bagaimana belajar bersama antara guru dan anak didik”. Dalam konteks ini, guru juga termasuk dalam proses belajar, sehingga lingkungan sekolah menjadi *Learning Society* (masyarakat belajar). Hal ini sesuai dengan empat visi pendidikan versi UNISCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*), sebagaimana dikutip Indra Djati Sidi dalam buku *Menuju Masyarakat*

Belajar (2001:25–26). Keempat visi dimaksud adalah [1] *Learning to think* (belajar berpikir) yang berarti pendidikan berorientasi pada pengetahuan yang logis dan rasional, sehingga anak didik mampu bersikap kritis serta memiliki semangat (*ghirah*) yang tinggi, [2] *Learning to do* (belajar berbuat atau hidup) yang berarti bagaimana anak didik memiliki keterampilan menyelesaikan problem keseharian, [3] *Learning to live together* (belajar hidup bersama) yang berarti bagaimana anak didik dapat memahami bahwa ia hidup di dunia ini tidak sendirian, termasuk makhluk sosial. Keempat visi tersebut pada akhirnya menjadi “*learning how to learn*” (“belajar bagaimana belajar”). *Alhasil*, pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik yang bersifat pemenuhan aspek kognitif saja, melainkan juga berorientasi pada bagaimana “mencipta” anak didik yang bisa belajar dari lingkungan, dari pengalaman dan kehebatan orang lain, dari keaktifan dan luasnya hamparan alam—sehingga mereka mampu—untuk mengembangkan sikap—sikap kreatif dan daya berpikir *imajinatif*.

Kedua, gagasan dimaksud adalah berkaitan dengan metode pengajaran yang tidak lagi mementingkan *subject matter* (pokok intinya) seperti yang tertuang dalam Garis–garis Besar Program Pelajaran [GBPP yang *rigid*] dari pada siswa itu sendiri. Sebab, pola seperti ini secara tidak langsung “memaksa” anak didik untuk menguasai pengetahuan dan melahap pelbagai informasi dari guru, tanpa memberi peluang pada anak didik untuk melakukan perenungan secara kritis, guru memberi sesuai GBPP, anak didik menerima. Inilah sebenarnya yang biasa disebut dengan model “*gaya*

bank” (*banking system*), meminjam istilah Paulo Freire. Bahkan Freire mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya menekankan pada kesadaran kritis tapi juga kreatif, sanggup menciptakan terobosan penting dalam menjawab pelbagai persoalan masyarakat yang mengitarinya (Freire, 2004:10).

Pertanyaannya adalah apakah anak didik akan berstatus sebagai *obyek* atau *klien*, dan atau ia berstatus sebagai *subyek* atau warga dalam pendidikan? (Zamrani, dalam Suyudi, 2005:279). Inilah sebenarnya yang harus kita telusuri secara lebih mendalam. Selanjutnya, “status” inilah yang akan *menkonstruksi* anak didik menuju proses “menjadi”, menjadi lebih baik atau sebaliknya!

Dengan demikian sebuah metode yang lebih cocok–relevan bagi anak didik di masa sekarang dan akan datang–, mutlak ditemukan untuk kemudian diterapkan. Apapun nama metode tersebut, bukan hal yang “penting”, asalkan lebih menekankan peran aktif anak (peserta) didik. Guru tetap dianggap lebih berpengalaman dan lebih banyak pengetahuannya, tapi ia bukan pemegang satu–satunya kebenaran, sebab kebenaran bisa jadi datang dari siswa. Jadi, metode tersebut bersifat dialogis menjadi suatu hal yang niscaya.

B. Upaya Mencipta dan Mewujudkan Learning Society

Negara berkembang seperti negara kita, Indonesia, pengembangan pendidikan seyogyanya dilihat sebagai suatu proses kelangsungan peradaban bangsa. Oleh karena itu, faktor–faktor psiko budaya juga penting untuk diikutsertakan dalam

merancang pendidikan, dan penting segera diciptakan agar tercipta situasi dan kondisi untuk kemudian keberhasilan suatu proses belajar akan semakin tercipta pula.

Masyarakat Indonesia, masih dalam proses dan pasca industri, sekaligus pasca reformasi—mengalami pelbagai macam transformasi—, terutama menyangkut pelbagai aspek sosial psikologis dan budaya dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta masyarakat. Pada dasarnya, transformasi sosial dan budaya dapat dikendalikan, khususnya dalam sektor pendidikan. Transformasi tersebut selalu dikaitkan dengan masyarakat industri. Adapun ciri—ciri masyarakat industri, menurut Torsten Husen (*Masyarakat Belajar*, tanpa tahun, hlm.38 dan 94) sebagai berikut: [1] Tingginya mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan [2] Perubahan struktur dan jumlah keluarga dari keluarga besar dan luas ke keluarga inti, ditandai dengan banyaknya perempuan bekerja di luar rumah, sehingga pendidikan anak menjadi terbengkalai, padahal kerjasama antara orang tua dan sekolah menjadi penting demi kesuksesan pendidikan anak [3] Kondisi ekonomi nasional sangat ditentukan oleh hubungan dagang dengan pasar internasional yang semakin kompetitif. [4] Pendidikan formal hanya dijadikan wahana untuk meraih keinginan memperbaiki nasib, wahana untuk bergerak ke atas mencapai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Sistem seleksi tenaga kerja cenderung menentukan syarat tingkat pendidikan formal tertentu, yang karena persyaratan itu, tenaga kerja kurang terdidik semakin tersisih.

Berkaitan dengan masalah ini terdapat tiga orientasi yang berkembang dalam dunia pendidikan. *Pertama*, pendidikan atau sekolah hanya berorientasi ijazah, sehingga banyak lembaga yang bertindak sebagai produsen ijazah (pabrik ijazah) dengan aneka harga (*Kompas*, 09/12/1999). *Kedua*, sekolah hanya berorientasi pada sekolah tanpa peduli apakah sekolah itu akan mengembangkan potensi yang dimilikinya atau malah menghasilkan *out put* yang tidak memahami zaman dan ujung-ujungnya menambah angka pengangguran (Azra, 1999:164). *Ketiga*, pendidikan hanya berorientasi pada pendidikan itu sendiri, tanpa peduli apakah pendidikan itu formal, non formal atau pun informal, yang penting proses pendidikan dapat berlangsung, meminjam istilah Ivan Illich atau bahasanya Roem Topatimasang, “*Sekolah itu Candu*” (1999 cet. II).

Jadi, apabila pelbagai orientasi pendidikan di atas masih “berlaku” dalam kontek ke–kinian dan ke–disini–an, maka sulit kiranya–peluang–bagi Masyarakat Belajar (*learning society*) untuk tercipta apalagi terwujud. Kemudian, manusia modern saat ini, tidak sedikit yang menyukai “hal-hal yang berbau instan”. Tidak mau menempuh pendidikan sebagaimana jalur yang “diundangkan”, membeli gelar misalnya, yang hal ini didukung lembaga penjual gelar yang semakin menggila dan merajalela. Akan tetapi, apabila, minimal tiga orientasi di atas tereliminir, maka peluang bagi Masyarakat Belajar (*learning society*) semakin besar–akan tercipta–, bahkan bisa jadi mudah terwujud.

Hanya ada satu kata untuk mencipta Masyarakat Belajar (*learning society*), “bagaimana proses mecerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan UUD 1945 hendaknya diselenggarakan melalui tiga jalur institusi pendidikan, yaitu: [1] lingkungan atau jalur sekolah dan luar sekolah [2] dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat [3] kegiatan yang tidak pernah putus atau disebut juga pendidikan seumur hidup (*life long education*).

Sedangkan upaya-usaha lain yang relatif-bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan Masyarakat Belajar (*learning society*) ada dua hal vital yang kebanyakan membuat vital tatkala tidak diperhatikan, yakni: [1] pemberdayaan keluarga menjadi keluarga yang gemar membaca. Keluarga mengarahkan proses tumbuh berkembangnya generasi muda dalam masyarakat, apakah keluarga mampu *mengkonstruksi* anak menjadi anak yang ganderung belajar? Keberanian untuk selalu mencoba, berpikir kritis, inovatif dan lain sebagainya. Kenapa keluarga? Karena keluarga mempunyai banyak fungsi, antara lain: fungsi keagamaan, cinta kasih, reproduksi, pendidikan, sosial dan lain-lain. [2] peningkatan partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol sosial.

Dalam Masyarakat Belajar (*learning society*), selalu berusaha mewujudkan pendidikan yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat mempertebal rasa saling memiliki terhadap keadaan yang ada dalam masyarakat dan negara, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat yang

mengelilinginya. Akhirnya dengan Masyarakat Belajar (*learning society*) diharapkan akan terwujud apa yang disebut Masyarakat Madani (*civil society*).

C. Cita–cita Perubahan dan Cita Ideal Mewujudkan Civil Society

Perubahan adalah sebuah keniscayaan sejarah. Ia hadir mrngiringi perjalanan hidup kita. Jatuh banggunnya peradaban manusia di masa lalu mengindikasikan bahwa proses perubahan selalu berjalan secara dinamis dan dialektis, tidak *deterministik* (bersifat menentukan). Perubahan, dengan demikian merupakan gambaran ideal dari sebuah cita–cita, dan refleksi kesadaran serta imaji dari masyarakatnya. Kehadirannya mampu membangkitkan energi terpendam dalam diri Muhammad Saw., Karl Mark, hingga Osama bin Laden. Energi yang misterius inilah yang kemudian menjadi tenaga pendorong perubahan yang sangat dahsyat di belahan dunia ini.

Adalah seorang Luther King, yang sempat memimpikan perubahan sosial, “keluar dari sebuah situasi yang membuat terasing (*alienasi*) dari dunianya, “pendidikan”. Disana ada nuansa ketidakadilan, ketimpangan, penindasan, dan lain sebagainya. Mengubah situasi sosial memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa manusia seperti Muhammad mampu berbuat sesuatu–bahkan merubah situasi Arab–, menghapus perbudakan, misalnya dan seterusnya menuju kemerdekaan yang hakiki dan manfaatnya dirasakan sampai saat ini. Karena itulah, dalam setiap perubahan sosial, selalu saja ditemukan faktor–faktor penting yang mengiringi perubahan itu sendiri.

Manurut Dr. Ausaf Ali (1998), seorang perintis Sains–sains sosial Islam, mengatakan bahwa faktor–faktor penting itu (faktor yang mengiringi perubahan), meliputi: [1] munculnya kritik terhadap realitas dan praktik sosial yang ada, yang dilakukan oleh mereka yang cenderung terhadap tatanan baru [2] adanya paradigma baru tentang nilai–nilai, norma, dan sistem penjas yang berbeda [3] partisipasi sosial yang dipilih oleh mereka yang cenderung dengan tatanan baru tersebut dalam mentransformasikan masyarakatnya.

Adakalanya perubahan sosial menghasilkan praktik yang menjanjikan, namun tidak sedikit pula perubahan sosial justru melahirkan sebaliknya, menjadi lebih melahirkan praktik–praktik sosial yang “tidak mendidik”. Disinilah pentingnya kita melihat kembali bagaimana sebuah proses perubahan sosial bisa membawa perubahan ke arah yang diinginkan. Termasuk dalam hal ini adalah cita–cita membentuk Masyarakat Madani (*civil society*). Masyarakat Madani tentunya bukan hanya sebuah gambaran ideal tentang cita praktik kehidupan bersama, tetapi lebih dari itu, ia merupakan sesuatu “yang ada disini”, yang dekat dengan kehidupan kita. Tentunya bagaimana membangun masyarakat yang memiliki tiga ciri: kebebasan, persamaan, dan toleransi.

Merujuk pada Malik Fadjar (1999), Masyarakat Madani (*civil society*) yang ingin diwujudkan di Indonesia berorientasi pada: [1] masyarakat yang *religius* dan bermoral, [2] demokratis *pluralistik* yang menghargai perbedaaan pendapat, keanekaragaman suku, agama, dan budaya [3] tertib dan sadar hukum serta menjunjung tinggi hukum

sebagai aturan tertinggi yang mengikat kehidupan bermasyarakat [4] mengakui dan menjunjung tinggi HAM, *egalitarianisme*, dan tidak diskriminatif [5] profesional dan *skillful*, memiliki keunggulan intelektual, keterampilan, dan *profesionalisme* yang komparatif dan kompetitif dalam persaingan global [6] masyarakat yang terbuka dan memiliki tradisi belajar (*learning*).

Alhasil, untuk mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*) diperlukan proses yang panjang dan kesabaran yang tak pernah henti. Dalam konteks kehidupan bangsa sekarang ini, dimana moralitas dan akhlak sudah hampir terkubur dalam gempita *konsumerisme* dan *hedonisme*, maka, kehadiran pendidikan yang membebaskan menjadi suatu hal yang niscaya. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan dimana manusia mampu membebaskan diri dan masyarakatnya dari; *kebodohan*, *keterbelakangan*, dan *kemiskinan*. Hal ini akan dapat tercipta tatkala pendidikan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa sebagai manusia dengan harkat dan martabatnya, *unique individual*; individu yang unik atau tak sama (John dan Hassan, 1995:616), yang bebas memberikan layanan agar mereka mampu melakukan aktualisasi diri, meminjam istilah Maslow, ilmuan Psikologi.

Jadi, untuk mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*) di Indonesia, terlebih dahulu harus tercipta–diciptakanlah–apa yang disebut Masyarakat Belajar (*learning society*). Karena inti dan makna yang terkandung dalam Masyarakat Belajar, sesungguhnya–hakikatnya merupakan “ruh” Masyarakat Madani (Lihat, harapan masyarakat belajar di atas). Masyarakat Belajar pun adalah proses menuju pendidikan

yang membebaskan. Dalam masyarakat belajar, tidak ada obyektifikasi terhadap peserta didik, yang ada adalah subyektifikasi, peserta didik diposisikan sebagai warga dalam pendidikan. Apabila iklim ini tercipta, maka proses belajar mengajar menjadi lebih hidup dan lebih bermakna. Pada akhirnya, belajar adalah proses yang menyenangkan, menuju pada perubahan sikap yang lebih “baik”.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari data–data dan ulasan–ulasan yang mengantarkan pada pemahaman wacana tentang Masyarakat Belajar (*learning society*) dan Masyarakat Madani (*civil society*) di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Konsep Masyarakat Belajar (*learning society*) sangat berpeluang mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*). Karena dalam Masyarakat Belajar terdapat kesadaran yang tinggi akan pentingnya belajar, tanpa harus digerakkan oleh institusi dalam bentuk apapun dan meniscayakan peran keluarga dan lingkungan. Masyarakat Belajar, menitikberatkan pada bagaimana pendidikan dapat diperoleh dari mana saja dan kapan saja, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Setiap aktivitas yang dilakukan selalu dipahami sebagai proses belajar. Karenanya sekolah itu ada dimana-mana, tidak hanya ada dalam sekolah yang sering disebut dengan formal institusional. Dalam Masyarakat Belajar, pendidikan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat termasuk penentu sukses tidaknya menkonstruksi anak didik menuju pembentukan yang berpotensi memiliki tiga bidang kompetensi; *pertama*, bidang kognitif *kedua*, afektif, dan *ketiga*, psikomotorik. Sehingga pendidikan menjadi tanggungjawab bersama.

Prinsip–prinsip yang sering diambil dari Masyarakat Belajar (*learning society*) antara lain: Pengetahuan dibangun oleh anak didik secara aktif, tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa, mengajar adalah membantu siswa belajar, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir dan guru atau pendidik bertindak sebagai fasilitator.

Sedangkan Masyarakat Madani (*civil society*) adalah masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang hidupnya didasarkan pada ruh Islam, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai–nilai demokrasi, masyarakat yang cinta keadilan, masyarakat yang menghargai persamaan hak, dan prinsip *egalitarianime*. Untuk mewujudkan Masyarakat Madani, harus diawali dengan terciptanya Masyarakat Belajar. Dengan lahir dan terciptanya Masyarakat belajar, sesungguhnya dengan sendirinya Masyarakat Madani akan tercipta.

B. SARAN–SARAN

Dengan memperhatikan hasil pembahasan terdahulu, Masyarakat Belajar (*learning society*) sebagai upaya mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*), maka hal–hal yang harus diperhatikan–untuk kemudian dilakukan guna mewujudkannya adalah:

Dalam membangun Masyarakat Belajar (*learning society*), hendaknya ada kesamaan visi antar pihak terkait; pembuat kebijakan publik (*public policy*), “pemerintah”, pelaksana kebijakan publik, “institusi atau lembaga pendidikan”, para pendidik, orang tua, anak didik, pemerhati pendidikan dan atau para pakar

pendidikan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

Dalam mengembangkan Masyarakat Belajar (*learning society*), seyogyanya dipahami sebagai usaha dan kebutuhan bersama. Oleh karenanya, kerjasama antar pihak terkait, merupakan hal yang niscaya. Dalam usaha mencipta iklim Masyarakat Belajar (*learning society*), selainnya seorang pendidik tidak lagi bertindak sebagai subyek, akan tetapi, pendidik hanya bertindak sebagai motifator—dengan tidak menafikan—pendidik sebagai teman berpikir anak didik yang senantiasa memiliki pengetahuan yang lebih, anak didik diposisikan sebagai subyek.

Pendidik hendaknya mengubah paradigma “mengajar” (*teaching*) menjadi “belajar” (*learning*), sehingga terciptalah masyarakat belajar (*learning society*). Masyarakat hendaknya meninggalkan paradigma bahwa pendidikan itu hanya ada di sekolah formal institusional, apalagi memasrahkan atau bahkan mengasumsikan sekolah—lah yang bertanggung jawab atas masa depan putra—putrinya, termasuk moralnya.

Dalam usaha mewujudkan Masyarakat Madani (*civil society*) perlu adanya usaha—usaha yang serius dalam membangun dan mengembangkan *civic cultur* (budaya keadaban), dengan menitikberatkan pada aspek sosial dan jaringan sosial yang menjadi titik lemah bagi terciptanya entitas sosial horizontal yang kuat. Dengan penekanan pada aspek itu, diharapkan dapat mendorong kearah kerjasama antar warga negara dalam menyelesaikan persoalan—persoalan publik yang ada disekitarnya. Sehingga pada gilirannya dapat mendorong terciptanya iklim kondusif Masyarakat

Madani (*civil society*). Disamping itu, pemerintah dan masyarakat, hendaknya memahami ruh Masyarakat Madani itu sendiri, bagaimana mewujudkan: nilai-nilai persamaan antar warga, keadilan, *pluralisme*, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) serta terbangunnya keadaban (*civility*).

Hendaknya, pendidikan politik warga negara (*civic education*) bukan hanya ditekankan pada aspek peningkatan kesadaran dan pengetahuan, tetapi juga dengan melakukan fasilitasi warga negara dengan tujuan mendorong agar lebih menguatkan partisipasi masyarakat dengan secara langsung melibatkan mereka dalam melakukan kontrol kebijakan publik (*public policy*).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Hasan, M., dan Mukti Ali, 2003, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: CV. Pedomon Ilmu Jaya.
- Azra, Azyumardi, 1999a, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos
- _____, 1999b, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos
- Azizy, Qodry, 2004, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhanuddin, (ed.), 2003, *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Jakarta: INCIS dan CSSP-USAID.
- Daradjat, Zakiah, dkk. 1996, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG.
- DePorter, Bobbi dan Hernacki, Mike, 2002, *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, Bandung: Kaifa.
- Djati Sidi, Indra, 2001, *Menuju Masyarakat Belajar*, Jakarta: Paramadina
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, 1995, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fadjar, A. Malik, et al., 1999, *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, Depag RI.

- Furqan, Arief. 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Freire, Paulo, 2004, *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*, Yogyakarta: Resist Book.
- Hadi, Sutrisno, 1987a, *Metode Researh I*, Yogyakarta: Afsed.
- _____, 1987b, *Metode Researh I*, Yogyakarta: Afsed
- Hikam, Muhammad A.S., 1996, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES
- _____, 1999, "Pengantar (1) Nahdlatul Ulama, Civil Society, dan Proyek Pencerahan, dalam Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society Dalam Wacana Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah dan Lakpesdam NU.
- Husen, Torsten, 1995, *Masyarakat Belajar*, terj. Surono Hergsewono, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2000, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakrta: Erlangga
- Khudari Shaleh, A., (Ed.) 2003, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Jendela.
- Moleong, Lexi J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Surasin.
- Nadjib Zuhdi dan Williem Kehelay, 2000, *Kamus Lengkap Praktis*, Surabaya, Fajar Mulya.
- Nurhadi dan Agus Gerrad Senduk, 2003, *Pembelajaran Kontekstual*, Malang: UM PRESS

- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola: Surabaya.
- Rahadjo, Dawam, 1999, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES Indonesia
- Ronisef, Syafnir, dkk., (Ed.) 2003, *Menggugat Benang Kusut Pendidikan*, Jakarta: Transofmasi UNJ dan Pustaka Pelajar.
- Rozak, Abdul, dkk., (Ed.) 2003, *Civic Education: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Subhan, Imam, (Ed.) 2003, *Siasat Gerakan Kota: Menuju Masyarakat Baru*, Yogyakarta, Penerbit Shalahuddin.
- Sidi, Indra Djati, 2001, *Menuju Masyarakat Belajar*, Jakarta: Paramadina dan PT. Logos Wacana Ilmu.
- Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sufyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Noercholisb Madjid*, Pustaka Pelajar dan YLP2IF, Yogyakarta.
- Suharsono, "Ideologi Intelektual", dalam *Warta Himpunan*, Edisi Juni-Agustus 1998
- Surachmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung.
- Suyudi, 2005, *Pendidikan Dalam Perspektif al-Qur'an*, Yogyakarta: Mikraj
- Topatimasang, Roem, 1999 cet. II, *Sekolah itu Candu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Usman, Widodo, dkk., (Ed.) 2000, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

SUMBER-SUMBER LAIN :

Kompas, 09/12/1999

Jawa Pos, 05/12/2004

Kompas, 17/01/2005

Kompas, 03/02/2005

Kompas, 03/02/2005